JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN
Homepage : https://ejurnal.stkip-pessel.ac.id/index.php/jmp
Email : jmp@stkip-pessel.ac.id

p-ISSN : 2548-4826 ; e-ISSN : 2548-4834
Vol. 11, No. 5, October 2026
Page 12430-12440
© Author
Jurnal Manajemen Pendidikan

DISPARITAS AKREDITASI MADRASAH: STUDI EMPIRIS-KOMPARATIF DI 38 PROVINSI INDONESIA

Muhammad Arifin[1], Sutrisno[2], Abd. Rahman Ambo' Dalle[3]
[1] Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Indonesia
[2, 3]Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: arifin.1068@uinkhas.ac.id

DOI: https://doi.org/10.34125/jmp.v11i5.3899

Sections Info

Article history:
Submitted: 6 August 2026
Final Revised: 30 September 2026
Accepted: 9 October 2026
Published: 30 October 2026

Keywords:
Disparity
Accreditation
Islamic School
Indonesia

ABSTRACT

Objective: *This study analyzes the distribution of madrasah accreditation status (Grade A, B, C, Not Yet Accredited, and Not Accredited) across 38 provinces and identifies the provinces with the highest and lowest accreditation performance relative to their number of madrasahs.* ***Method:*** *This descriptive-comparative quantitative study used secondary data from the Ministry of Religious Affairs' EMIS covering 88,331 madrasahs. The data were validated by cross-checking row and column totals, then analyzed by calculating the percentage in each category, comparing provinces, and ranking them with a weighted accreditation quality index.* ***Results:*** *A total of 80.54% of madrasahs were accredited, yet only 14.33% held Grade A, and 19.46% were not yet or not accredited. DI Yogyakarta (index 67.0), Gorontalo (60.0), and Central Java (59.6) ranked highest, whereas Papua Pegunungan (20.0), Central Papua (39.6), and Maluku (39.8) ranked lowest. High-ranking provinces reached their positions through either superior grade quality or broad coverage, and comparing absolute numbers yielded different priorities than comparing percentages.* ***Novelty:*** *This study maps all 38 provinces proportionally by separating the coverage and quality dimensions of accreditation, an approach that, in the author's literature search, was not found in earlier studies, which are generally local in scale.*

ABSTRAK

Objektif: *Penelitian ini bertujuan menganalisis distribusi status akreditasi madrasah (Peringkat A, B, C, Belum Terakreditasi, dan Tidak Terakreditasi) di 38 provinsi serta mengidentifikasi provinsi dengan capaian akreditasi tertinggi dan terendah relatif terhadap jumlah madrasahnya.* ***Metode:*** *Penelitian kuantitatif deskriptif-komparatif ini menggunakan data sekunder rekapitulasi EMIS Kementerian Agama atas 88.331 madrasah (2026). Data divalidasi melalui pencocokan jumlah antarbaris dan antarkolom, kemudian dianalisis melalui perhitungan persentase tiap kategori, komparasi antarprovinsi, dan penyusunan peringkat menggunakan skor indeks mutu akreditasi tertimbang.* ***Hasil:*** *Sebanyak 80,54% madrasah telah terakreditasi, tetapi hanya 14,33% berperingkat A dan 19,46% belum atau tidak terakreditasi. DI Yogyakarta (skor 67,0), Gorontalo (60,0), dan Jawa Tengah (59,6) menempati tiga peringkat teratas, sedangkan Papua Pegunungan (20,0), Papua Tengah (39,6), dan Maluku (39,8) menempati tiga peringkat terbawah. Provinsi unggul mencapai posisinya melalui keunggulan mutu peringkat atau luasnya cakupan, dan perbandingan jumlah absolut menghasilkan prioritas yang berbeda dari perbandingan persentase.* ***Kebaruan:*** *Penelitian ini memetakan seluruh 38 provinsi secara proporsional dengan memisahkan dimensi cakupan dan mutu akreditasi, suatu pendekatan yang pada penelusuran literatur penulis belum ditemukan pada studi terdahulu yang umumnya berskala lokal.*

Kata kunci: *Disparitas, Akreditasi, Madrasah, Indonesia*

PENDAHULUAN

Madrasah merupakan bagian penting dari sistem pendidikan nasional Indonesia, dengan jumlah satuan pendidikan yang sangat besar dan tersebar di seluruh wilayah (Husnul Abid, 2021). Berdasarkan data EMIS Kementerian Agama, terdapat 88.331 madrasah di 38 provinsi, terdiri atas 4.082 madrasah negeri dan 84.249 madrasah swasta (Kemenag RI, 2026). Dominasi madrasah swasta menunjukkan bahwa penjaminan mutu tidak cukup bertumpu pada satuan pendidikan yang dikelola pemerintah, tetapi juga harus menjangkau lembaga yang dikelola masyarakat (Khadar et al., 2025; Rohman & Mudis Taruna, 2025). Salah satu indikator mutu yang lazim digunakan adalah akreditasi, yang memberikan gambaran tingkat kelembagaan tentang mutu dan kelayakan suatu madrasah (Sholekah et al., 2026).

Data sekunder EMIS menunjukkan bahwa kondisi akreditasi madrasah secara nasional masih menyisakan pekerjaan rumah. Sebanyak 71.141 madrasah (80,54%) telah memiliki peringkat akreditasi A, B, atau C, tetapi peringkat tertinggi hanya dimiliki 12.654 madrasah (14,33%). Peringkat B mendominasi dengan 42.129 madrasah (47,69%), sementara 16.598 madrasah (18,79%) belum terakreditasi dan 592 madrasah (0,67%) berstatus tidak terakreditasi (Kemenag RI, 2026). Dengan demikian, hampir satu dari lima madrasah (19,46%) belum atau tidak memiliki peringkat akreditasi. Pola serupa pernah dilaporkan pada skala daerah: di Provinsi Jambi, hanya sekitar 43% dari 1.036 lembaga pendidikan Islam yang diteliti telah terakreditasi, dan banyak di antaranya berperingkat C (Jailani, 2016).

Tabel 1. Status akreditasi madrasah nasional, 2026

STATUS AKREDITASI	JUMLAH MADRASAH	PERSENTASE
PERINGKAT A	12.654	14,33%
PERINGKAT B	42.129	47,69%
PERINGKAT C	16.358	18,52%
SUBTOTAL TERAKREDITASI	*71.141*	*80,54%*
BELUM TERAKREDITASI	16.598	18,79%
TIDAK TERAKREDITASI	592	0,67%
SUBTOTAL BELUM/TIDAK TERAKREDITASI	*17.190*	*19,46%*
TOTAL	88.331	100%

Gambaran nasional tersebut belum cukup untuk memahami persoalan lembaga pendidikan di Indonesia (Irawan et al., 2025), termasuk ketimpangan sebaran madrasah antarprovinsi. Tiga provinsi di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah) menaungi 49.730 madrasah atau 56,30% dari seluruh madrasah nasional, dan menyumbang 66,13% madrasah berakreditasi A. Akibatnya, perbandingan berdasarkan jumlah absolut cenderung mencerminkan besarnya populasi madrasah, bukan mutu akreditasinya. Jawa Timur, misalnya, memiliki madrasah berakreditasi A terbanyak (2.896), tetapi persentasenya hanya 13,47% dari seluruh madrasah di provinsi tersebut. Sebaliknya, DI Yogyakarta hanya memiliki 239 madrasah berakreditasi A, namun jumlah itu setara 34,84% dari madrasahnya, tertinggi di Indonesia (Kemenag RI, 2026). Kesenjangan antara Jawa dan luar Jawa dalam mutu sekolah/madrasah sebenarnya telah dicatat sejak lama (Suryawati, 2026), dan disparitas capaian akreditasi juga ditemukan di wilayah tertinggal, misalnya di Provinsi Maluku (Prihono et al., 2025).

Meskipun demikian, penelitian terdahulu tentang akreditasi madrasah umumnya masih terbatas pada satu wilayah atau sejumlah kecil sampel. Jailani, 2016) memotret satu provinsi, yaitu Jambi, dengan data tahun 2012; Suryawati (2026) membahas pembinaan sekolah/madrasah di Sumatera Utara secara kualitatif; Prihono et al., (2025) menganalisis

skor akreditasi 2021 pada 18 madrasah di Maluku dan menitikberatkan pada bias pengukuran; sedangkan Sholekah et al., (2026) merupakan kajian pustaka yang menekankan bahwa akreditasi bukan jaminan mutu yang berdiri sendiri. Berdasarkan penelusuran literatur untuk artikel ini, belum ditemukan studi yang memetakan distribusi lima kategori status akreditasi (A, B, C, Belum Terakreditasi, dan Tidak Terakreditasi) pada seluruh 38 provinsi menggunakan data EMIS nasional, dan membandingkannya secara relatif terhadap jumlah madrasah di tiap provinsi. Kekosongan inilah yang diisi oleh artikel ini.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini menganalisis distribusi akreditasi madrasah di 38 provinsi menggunakan data sekunder EMIS Kemenag. Analisis dilakukan dengan membandingkan jumlah dan persentase tiap kategori, serta menyusun peringkat provinsi menggunakan skor indeks mutu akreditasi, yaitu ukuran tertimbang yang memperhitungkan cakupan sekaligus peringkat akreditasi. Tujuannya adalah mengidentifikasi provinsi dengan capaian akreditasi terbaik dan terendah, sehingga hasilnya dapat menjadi dasar penentuan prioritas pembinaan dan kebijakan penjaminan mutu madrasah yang lebih tepat sasaran.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif-komparatif (Creswell, 2014), dengan data sekunder berupa rekapitulasi akreditasi madrasah menurut provinsi yang bersumber dari EMIS Kementerian Agama pada tahun 2026 (Kemenag RI, 2026). Populasi penelitian adalah seluruh madrasah pada 38 provinsi, berjumlah 88.331 satuan pendidikan, sehingga tidak dilakukan pengambilan sampel. Data memuat jumlah madrasah pada lima kategori status akreditasi (Peringkat A, B, C, Belum Terakreditasi, dan Tidak Terakreditasi) beserta total madrasah di setiap provinsi. Data dipindahkan ke lembar kerja dan divalidasi sebelum dianalisis. Validasi dilakukan dengan memeriksa bahwa jumlah kelima kategori pada setiap provinsi sama dengan total madrasah provinsi, bahwa jumlah setiap kolom pada 38 provinsi sama dengan total nasional, dan bahwa jumlah madrasah berperingkat A, B, dan C sama dengan jumlah madrasah terakreditasi pada ringkasan data. Seluruh pemeriksaan tersebut menunjukkan kesesuaian penuh.

Analisis data dilakukan dalam tiga tahap. Pertama, jumlah madrasah pada setiap kategori diubah menjadi persentase terhadap total madrasah di provinsi masing-masing, sehingga provinsi dengan jumlah madrasah yang berbeda jauh dapat dibandingkan secara proporsional; persentase terakreditasi dihitung sebagai (A + B + C) ÷ total × 100. Kedua, jumlah dan persentase tiap kategori dibandingkan antarprovinsi untuk mengidentifikasi provinsi dengan nilai tertinggi dan terendah. Provinsi dengan kurang dari 100 madrasah (enam provinsi di Papua) dikecualikan dari penentuan nilai ekstrem dan disajikan terpisah dengan catatan, karena satu madrasah dapat menggeser persentasenya secara besar. Ketiga, provinsi diperingkat menggunakan skor indeks mutu akreditasi, yaitu (3 × A + 2 × B + 1 × C) ÷ (3 × total) × 100, dengan bobot nol untuk Belum Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi. Skor berkisar 0 sampai 100, dengan nilai 100 apabila seluruh madrasah berperingkat A. Peringkat ini dibandingkan dengan peringkat berdasarkan persentase Akreditasi A dan persentase terakreditasi untuk melihat konsistensi hasil. Selanjutnya ditetapkan 10 provinsi terbaik dan 10 provinsi terendah. Bobot 3-2-1-0 merupakan pilihan peneliti, bukan ketentuan resmi, dan keterbatasan ini perlu diperhatikan dalam menafsirkan peringkat.

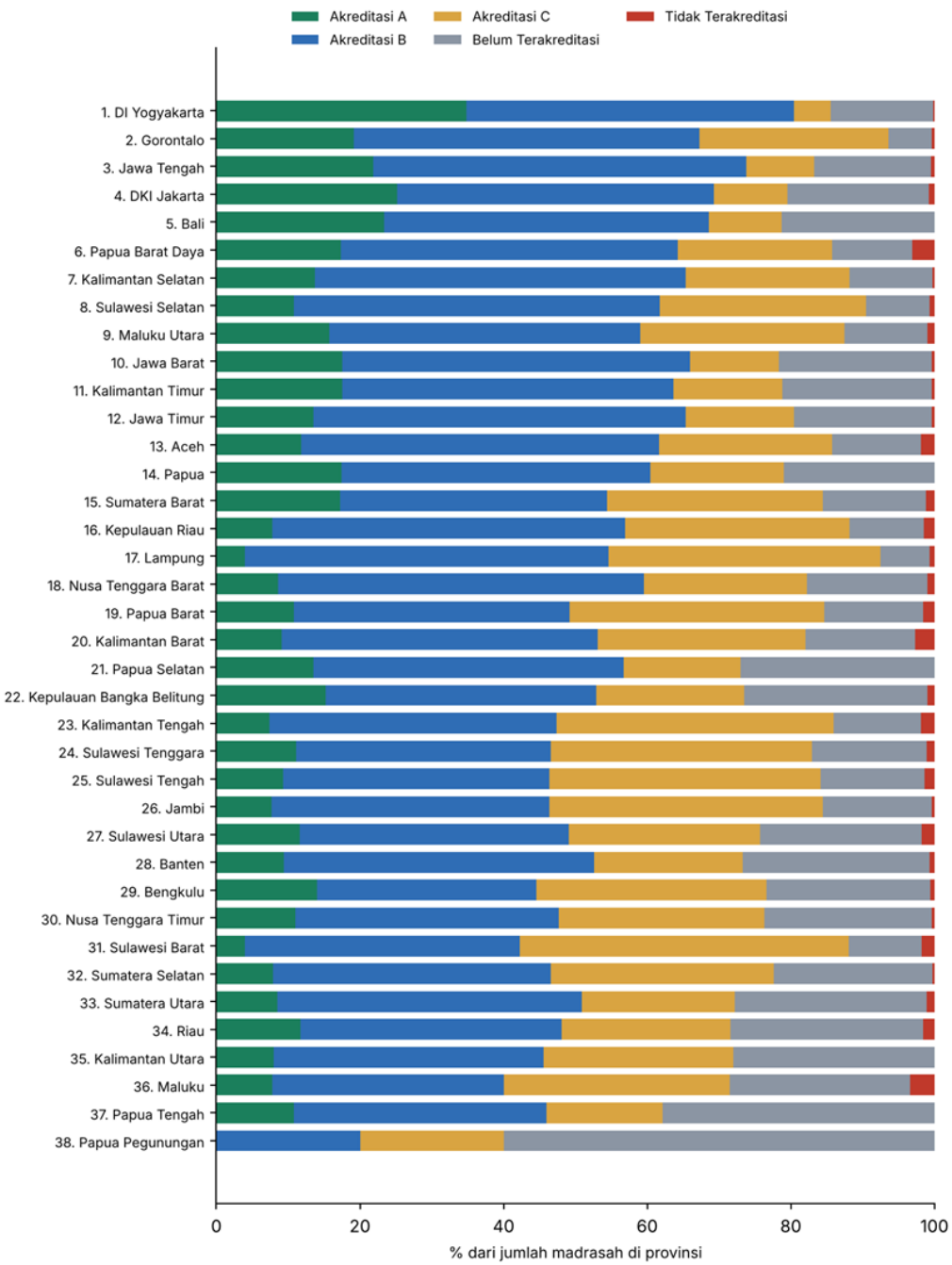
HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Secara nasional, distribusi akreditasi adalah sebagai berikut: Akreditasi A 12.654 madrasah (14,33%); B 42.129 (47,69%); C 16.358 (18,52%); Belum Terakreditasi 16.598 (18,79%); dan Tidak Terakreditasi 592 (0,67%). Berdasarkan hasil penelitian, peringkat B pada madarasah di Indonesia mendominasi hampir separuh madrasah. Sedangkan, madrasah yang belum atau tidak terakreditasi berjumlah 17.190 (19,46%), dengan Skor Indeks Mutu nasional adalah 52,29. Selain itu, data EMIS Kemenag tersebut juga menunjukkan bahwa Tiga provinsi di Pulau Jawa (Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah) memiliki 49.730 madrasah atau 56,30% dari seluruh madrasah nasional, dan menyumbang 66,13% dari seluruh madrasah berakreditasi A. Sehingga, konsentrasi ini membuat angka nasional sangat dipengaruhi kondisi Jawa (Kemenag RI, 2026).

Berdasarkan angka absolut, hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa Jawa Timur, Jawa Barat, dan Jawa Tengah menempati tiga urutan teratas pada seluruh kategori. Jawa Timur memiliki madrasah Akreditasi A terbanyak (2.896), disusul Jawa Barat (2.854) dan Jawa Tengah (2.618). Jawa Timur juga memiliki jumlah Peringkat B (11.165), C (3.244), dan Belum Terakreditasi (4.117) terbanyak, serta Tidak Terakreditasi terbanyak (84), disusul Jawa Barat (62) dan Jawa Tengah (59) (Kemenag RI, 2026). Jumlah absolut tersebut hanya mencerminkan besarnya populasi madrasah secara kuantitas daripada mutu akreditasinya.

Perbandingan persentase sebagaimana Gambar 1 mengubah gambaran tersebut. Misalnya, Jawa Timur memiliki madrasah Akreditasi A paling banyak, namun persentasenya hanya 13,47% dari 21.506 madrasahnya, di bawah rata-rata nasional (14,33%). Sebaliknya DI Yogyakarta hanya memiliki 239 madrasah A, tetapi itu mencapai 34,84% dari 686 madrasahnya, tertinggi di Indonesia. Ringkasan tiga provinsi tertinggi dan terendah per kategori.



Gambar 1. Komposisi status akreditasi madrasah per provinsi (%), urut peringkat

Sepuluh provinsi dengan akreditasi terbaik menurut skor indeks mutu adalah DI Yogyakarta (67,0), Gorontalo (60,0), Jawa Tengah (59,6), DKI Jakarta (58,0), Bali (56,9), Papua Barat Daya (55,8), Kalimantan Selatan (55,7), Sulawesi Selatan (54,3), Maluku Utara (54,1), dan Jawa Barat (54,0). Seluruhnya berada di atas skor nasional (52,29). DI Yogyakarta unggul karena 34,84% madrasahnya berperingkat A, tertinggi di Indonesia, dan hanya 5,10% berperingkat C. Kelompok provinsi yang kuat pada peringkat A juga mencakup DKI Jakarta (25,19%), Bali (23,38%), dan Jawa Tengah (21,84%). Jawa Tengah menonjol karena capaian itu diraih pada populasi yang sangat besar, yaitu 11.985 madrasah, dengan 2.618 madrasah berperingkat A dan 51,95% berperingkat B (Kemenag RI, 2026).

Provinsi lain pada 10 besar mencapai posisinya melalui jalur yang berbeda, yaitu cakupan akreditasi yang luas. Gorontalo mencatat 93,61% madrasah terakreditasi, tertinggi nasional,

dengan hanya 6,02% yang belum terakreditasi. Sulawesi Selatan (90,49%), Kalimantan Selatan (88,10%), dan Maluku Utara (87,50%) juga memiliki cakupan tinggi, tetapi porsi peringkat A-nya lebih rendah (10,76% sampai 15,76%), sehingga banyak madrasahnya berada pada peringkat B dan C. Jawa Barat menempati urutan ke-10 dengan cakupan 78,4%, yang terendah di antara 10 besar, karena 21,3% madrasahnya belum terakreditasi. Papua Barat Daya memiliki skor tinggi, tetapi jumlah madrasahnya hanya 98 dan 3,06% di antaranya berstatus tidak terakreditasi (Kemenag RI, 2026).

Tabel 2. Sepuluh provinsi terbaik menurut Skor Indeks Mutu Akreditasi

Rank	Provinsi	Jumlah Madrasah	% A	% B	% C	% Belum / % Tidak	% Terakre-ditasi	Skor Indeks
1	DI Yogyakarta	686	34,8	45,6	5,1	14,3 / 0,1	85,6	67,0
2	Gorontalo	266	19,2	48,1	26,3	6,0 / 0,4	93,6	60,0
3	Jawa Tengah	11.985	21,8	51,9	9,4	16,3 / 0,5	83,2	59,6
4	DKI Jakarta	1.818	25,2	44,1	10,2	19,6 / 0,8	79,5	58,0
5	Bali	325	23,4	45,2	10,2	21,2 / 0,0	78,8	56,9
6	Papua Barat Daya	98	17,3	46,9	21,4	11,2 / 3,1	85,7	55,8
7	Kalimantan Selatan	1.473	13,7	51,7	22,7	11,6 / 0,3	88,1	55,7
8	Sulawesi Selatan	2.713	10,8	50,9	28,8	8,8 / 0,7	90,5	54,3
9	Maluku Utara	495	15,8	43,2	28,5	11,5 / 1,0	87,5	54,1
10	Jawa Barat	16.239	17,6	48,4	12,4	21,3 / 0,4	78,4	54,0

Pada sisi sebaliknya, 10 provinsi terendah adalah Papua Pegunungan (20,0), Papua Tengah (39,6), Maluku (39,8), Kalimantan Utara (41,9), Riau (43,8), Sumatera Utara (43,9), Sumatera Selatan (44,0), Sulawesi Barat (44,8), Nusa Tenggara Timur (45,0), dan Bengkulu (45,1). Seluruhnya berada di bawah skor nasional. Ciri yang paling sering muncul adalah tingginya porsi madrasah yang belum terakreditasi: Kalimantan Utara 28,00%, Riau 26,90%, Sumatera Utara 26,70%, Maluku 25,11%, Nusa Tenggara Timur 23,25%, Bengkulu 22,80%, dan Sumatera Selatan 22,08%. Di antara provinsi dengan jumlah madrasah besar, Sumatera Utara (4.951 madrasah, termasuk 1.322 yang belum terakreditasi) dan Riau (2.253 madrasah, 606 belum terakreditasi) menjadi yang terendah. Maluku juga mencatat proporsi tidak terakreditasi tertinggi di antara provinsi dengan lebih dari 100 madrasah, yaitu 3,38% (Kemenag RI, 2026).

Dua provinsi memperlihatkan pola yang berbeda dari kelompok tersebut. Sulawesi Barat memiliki cakupan akreditasi cukup tinggi (88,0%), tetapi hanya 3,93% madrasahnya berperingkat A dan 45,74% berperingkat C, sehingga skornya rendah karena mutu peringkat, bukan karena cakupan. Papua Pegunungan dan Papua Tengah menempati dua posisi terbawah dengan jumlah madrasah yang sangat kecil (masing-masing 5 dan 37 madrasah). Di Papua Pegunungan tidak ada madrasah berperingkat A dan 60% belum terakreditasi, sedangkan di Papua Tengah 37,84% belum terakreditasi. Karena jumlahnya kecil, satu atau dua madrasah dapat mengubah persentase secara besar. Data ini juga tidak menjelaskan penyebab perbedaan antarprovinsi, sehingga kajian lanjutan perlu menelaah faktor seperti ketersediaan sumber daya, kondisi geografis, dan kapasitas pengelolaan madrasah.

Tabel 2. Sepuluh Provinsi Terendah menurut Skor Indeks Mutu Akreditasi (urut dari yang paling rendah)

Rank	Provinsi	Jumlah Madrasah	% A	% B	% C	% Belum / % Tidak	% Terakre-ditasi	Skor Indeks
38	Papua Pegunungan	5	0,0	20,0	20,0	60,0 / 0,0	40,0	20,0
37	Papua Tengah	37	10,8	35,1	16,2	37,8 / 0,0	62,2	39,6
36	Maluku	474	7,8	32,3	31,4	25,1 / 3,4	71,5	39,8
35	Kalimantan Utara	125	8,0	37,6	26,4	28,0 / 0,0	72,0	41,9
34	Riau	2.253	11,7	36,4	23,5	26,9 / 1,6	71,5	43,8
33	Sumatera Utara	4.951	8,5	42,5	21,2	26,7 / 1,1	72,2	43,9
32	Sumatera Selatan	2.011	7,9	38,7	31,0	22,1 / 0,3	77,6	44,0
31	Sulawesi Barat	610	3,9	38,4	45,7	10,2 / 1,8	88,0	44,8
30	Nusa Tenggara Timur	499	11,0	36,7	28,7	23,2 / 0,4	76,4	45,0
29	Bengkulu	500	14,0	30,6	32,0	22,8 / 0,6	76,6	45,1

Diskusi

Temuan utama penelitian ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara cakupan akreditasi dan mutu peringkat yang dicapai selama ini oleh madrasan di Indonesia. Secara nasional, 80,54% madrasah telah terakreditasi, tetapi hanya 14,33% yang memperoleh peringkat A, sedangkan hampir separuhnya (47,69%) berada pada peringkat B. Pada tataran deskriptif, capaian tersebut dapat dimaknai sebagai indikasi meluasnya jangkauan penjaminan mutu eksternal (Busahdiar et al., 2023). Namun, interpretasi demikian perlu disikapi secara kritis karena akreditasi hanya memberikan gambaran mutu pada level kelembagaan dan tidak dapat diposisikan sebagai jaminan mutu pendidikan yang berdiri sendiri (Kayyali, 2025; Sholekah et al., 2026; Wafik & Tharwat, 2019). Bukti empiris di luar konteks akreditasi memperkuat kehati-hatian tersebut: berdasarkan data seleksi nasional tahun 2021, siswa madrasah rata-rata mencatat skor matematika yang lebih rendah dibandingkan siswa non-madrasah (Umar et al., 2022). Dengan demikian, peringkat akreditasi yang tinggi tidak serta-merta merepresentasikan capaian belajar yang tinggi, dan data penelitian ini terbatas pada status akreditasi, bukan pada hasil belajar peserta didik (Asnawi & Setyaningsih, 2020; Håkansson & Adolfsson, 2021).

Pada kelompok 10 provinsi dengan capaian tertinggi, teridentifikasi dua jalur yang berbeda dalam mencapai posisi tersebut. DI Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, dan Jawa Tengah unggul pada dimensi mutu, dengan proporsi peringkat A berkisar antara 21,84% dan 34,84%. Sebaliknya, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Maluku Utara unggul pada dimensi cakupan (87,50% hingga 93,61%) dengan proporsi peringkat A yang relatif lebih rendah (10,76% hingga 19,17%) (Kemenag RI, 2026). Perbedaan ini mengindikasikan bahwa skor indeks agregat dapat menyamarkan kondisi yang secara substantif berbeda di balik nilai yang berdekatan, sehingga implikasi kebijakannya pun tidak seragam (Hakim et al., 2026; Pont, 2020). Kelompok pertama memerlukan penguatan mutu sekaligus penuntasan madrasah yang belum terakreditasi (14,29% di DI Yogyakarta), sedangkan kelompok kedua memerlukan upaya peningkatan peringkat dari B dan C menuju A. Capaian DI Yogyakarta dapat dikaitkan dengan temuan bahwa madrasah swasta di wilayah ini mampu bertahan melalui modal spiritual, budaya, dan sosial meskipun melayani peserta didik dari keluarga berpenghasilan rendah (Hopid et al., 2023; Setiyani et al., 2025). Akan tetapi, studi tersebut

berbasis kasus tunggal sehingga keterkaitannya dengan capaian akreditasi tingkat provinsi baru berstatus dugaan yang memerlukan pengujian lebih lanjut.

Pada kelompok 10 provinsi dengan capaian terendah, karakteristik yang konsisten muncul adalah tingginya proporsi madrasah yang belum terakreditasi, yaitu 22,08% hingga 28,00% pada tujuh provinsi. Sulawesi Barat menunjukkan pola yang menyimpang dari kecenderungan tersebut. Cakupan akreditasinya tergolong tinggi (88,0%), tetapi hanya 3,93% madrasah berperingkat A dan 45,74% berperingkat C, sehingga skor indeksnya rendah akibat rendahnya mutu peringkat, bukan keterbatasan cakupan (Kemenag RI, 2026). Temuan ini menantang asumsi umum bahwa persoalan utama di wilayah tertinggal adalah akses terhadap akreditasi. Pada kasus Maluku (peringkat ke-36), penelitian terhadap 18 madrasah di provinsi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan pengukuran pada instrumen berpengaruh signifikan terhadap kinerja madrasah, dan ketimpangan lebih bersumber dari rancangan instrumen daripada subjektivitas asesor (Prihono et al., 2025). Apabila temuan tersebut berlaku lebih luas, rendahnya peringkat di sebagian wilayah tertinggal berpotensi mencerminkan ketidaksesuaian instrumen dengan konteks lokal (Liu et al., 2023), bukan semata-mata rendahnya mutu penyelenggaraan pendidikan (Yunilarosi, 2025). Data penelitian ini tidak memungkinkan pemisahan kedua penjelasan tersebut, sehingga hasilnya perlu dimaknai sebagai peringkat status akreditasi, bukan penilaian definitif atas mutu pendidikan (Darwanto et al., 2024).

Konsentrasi madrasah di Pulau Jawa menunjukkan bahwa ukuran relatif dan ukuran absolut menuntut prioritas penanganan yang berbeda (Muhayani et al., 2026). Tiga provinsi di Pulau Jawa menaungi 56,30% madrasah nasional, dan beban absolut madrasah yang belum terakreditasi terbesar terdapat di Jawa Timur (4.117) dan Jawa Barat (3.452), meskipun proporsinya (19,14% dan 21,26%) tidak jauh berbeda dari rata-rata nasional (18,79%) (Kemenag RI, 2026). Pendekatan yang hanya mengacu pada persentase akan memprioritaskan provinsi berskala kecil seperti Kalimantan Utara, sedangkan pendekatan yang hanya mengacu pada jumlah akan memprioritaskan Pulau Jawa; keduanya absah menurut kriterianya masing-masing sehingga pengambil kebijakan perlu mempertimbangkan keduanya secara simultan. Salah satu hipotesis yang layak diuji lebih lanjut adalah pengaruh beban administrasi. Studi pada sekolah menengah negeri di Jawa Barat melaporkan beban administrasi yang lebih tinggi akibat sistem digital yang terfragmentasi dan menguatnya tuntutan akuntabilitas, dengan strategi adaptasi yang bersifat informal dan bergantung pada kapasitas masing-masing sekolah (Priatna et al., 2026). Namun, studi tersebut tidak membahas akreditasi maupun madrasah, sehingga rujukan ini hanya berfungsi sebagai analogi, bukan sebagai bukti langsung.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dipertimbangkan dalam menginterpretasikan temuan. Pertama, analisis dilakukan pada level provinsi sehingga variasi antarkabupaten atau kota serta perbedaan antara madrasah negeri dan swasta, yang berpotensi besar, tidak dapat teridentifikasi. Kedua, pembobotan skor indeks (3-2-1-0) merupakan pilihan peneliti sehingga peringkat dapat bergeser apabila bobot diubah; selisih skor yang sangat tipis, seperti pada Banten dan Bengkulu yang sama-sama 45,1 pada pembulatan satu desimal, tidak layak ditafsirkan sebagai perbedaan mutu yang bermakna (Kemenag RI, 2026). Ketiga, data bersifat potong lintang sehingga tidak menggambarkan tren, dan beberapa provinsi di Papua memiliki jumlah madrasah yang terlalu kecil untuk menghasilkan persentase yang stabil. Penelitian selanjutnya disarankan menggunakan data level kabupaten/kota, membandingkan madrasah negeri dan swasta, menghubungkan status akreditasi dengan capaian belajar peserta didik (Umar et al., 2022), serta menguji kesesuaian instrumen akreditasi dengan karakteristik wilayah (Prihono et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa akreditasi madrasah di Indonesia memiliki cakupan luas, tetapi mutu peringkatnya belum merata, dan ketimpangan itu tampak jelas hanya jika provinsi dibandingkan secara proporsional. Dari 88.331 madrasah di 38 provinsi, 80,54% sudah terakreditasi, namun hanya 14,33% berperingkat A, sementara 19,46% belum atau tidak terakreditasi. DI Yogyakarta unggul menurut indeks mutu akreditasi (67,0), diikuti Gorontalo (60,0) dan Jawa Tengah (59,6). Posisi terendah ditempati Papua Pegunungan (20,0), Papua Tengah (39,6), dan Maluku (39,8). Provinsi berperingkat tinggi mencapainya lewat dua jalur: keunggulan mutu atau keunggulan cakupan. Sulawesi Barat menunjukkan cakupan tinggi (88,0%) dapat disertai peringkat A yang sangat rendah (3,93%). Angka absolut dan persentase juga menghasilkan prioritas berbeda: Jawa Timur dan Jawa Barat menanggung beban absolut terbesar, sedangkan beban proporsional terbesar ada di provinsi kecil seperti Kalimantan Utara. Karena itu, kebijakan penjaminan mutu tidak cukup bertumpu pada satu indikator atau pendekatan seragam. Perluasan akreditasi diprioritaskan pada provinsi dengan proporsi madrasah belum terakreditasi tinggi, sedangkan peningkatan peringkat dari B dan C ke A diprioritaskan pada provinsi bercakupan tinggi tetapi bermutu rendah.

Kesimpulan ini terbatas pada analisis tingkat provinsi dengan data potong lintang, sehingga variasi antarkabupaten/kota, perbedaan negeri dan swasta, serta tren waktu tidak terungkap. Bobot indeks ditetapkan peneliti, sehingga peringkat dapat bergeser, dan persentase pada provinsi bermadrasah sedikit, terutama di Papua, kurang stabil. Penelitian lanjutan disarankan memakai data kabupaten/kota dan runtut waktu, menguji sensitivitas pembobotan, serta mengaitkan akreditasi dengan capaian belajar. Akreditasi sebaiknya dipahami sebagai alat diagnosis, bukan tujuan akhir..

REFERENSI

Asnawi, N., & Setyaningsih, N. D. (2020). Perceived service quality in Indonesian Islamic higher education context: A test of Islamic higher education service quality (i-HESQUAL) model. *Journal of International Education in Business*, *13*(1), 107–130. Scopus. https://doi.org/10.1108/JIEB-11-2019-0054

Busahdiar, Ummah Karimah, & Sudirman Tamin. (2023). Total Quality Management (TQM) and Basic Education: Its Application to Islamic Education in Muhammadiyah Elementary Schools. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, *20*(2), 215–232. https://doi.org/10.14421/jpai.v20i2.8015

Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). SAGE Publications.

Darwanto, A., Prahmana, R., Susanti, A., & Khalil, I. (2024). Transformation of Boarding School Management Models in Enhancing Student Accessibility and Educational Quality. *Jurnal Pendidikan Agama Islam*. https://doi.org/10.14421/jpai.v21i1.8632

Håkansson, J., & Adolfsson, C.-H. (2021). Local education authority's quality management within a coupled school system: Strategies, actions, and tensions. *Journal of Educational Change*, *23*, 291–314. https://doi.org/10.1007/s10833-021-09414-6

Hakim, L., Rizaldi, M., Suman, A., Ekawaty, M., Riza, A., & Zhahirah, N. (2026). Village Development Inequality in Indonesia: Mapping the Influence of Human Capital and Village Funds. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, *14*(1), 485–508. https://doi.org/10.26811/peuradeun.v14i1.1307

Hopid, A., Wantini, W., Rahman, A., Hidayat, K., & Jhati, G. (2023). The existence of private madrasas in the era of capitalization of education in Yogyakarta. *TARBAWY:*

Indonesian Journal of Islamic Education, *10*(1), 121–132. https://doi.org/10.17509/t.v10i1.56972

Husnul Abid, M. (2021). TRADITIONAL MADRASAH, STATE POLICIES AND THE RISE OF INTEGRATED ISLAMIC SCHOOLS IN JAMBI. *Journal of Indonesian Islam*, *15*(1), 75–102. Scopus. https://doi.org/10.15642/JIIS.2021.15.1.75-102

Irawan, I. M. B. H., Sugiartawan, P., Saraswati, N. W. S., & Asana, I. M. D. P. (2025). AI-Assisted Accreditation Evaluation Using a Web- Based GPT-RAG System within the LAM INFOKOM Framework. *2025 IEEE International Symposium on Consumer Technology (ISCT)*, 421–426. https://doi.org/10.1109/ISCT66099.2025.11297403

Jailani, M. S. (2016). Keberadaan Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah (Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Madrasah Di Provinsi Jambi). *Madrasah: Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Dasar*, *7*(2), 22. https://doi.org/10.18860/jt.v7i2.3320

Kayyali, M. (2025). Overcoming Common Accreditation Challenges: Strategies and Case Studies. In A. Naim, A. Saklani, S. A. Khan, & P. K. Malik (Eds.), *Global Perspectives on Quality Management and Accreditation in Higher Education* (pp. 317–348). IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9481-6.ch014

Kemenag RI. (2026). *Rekapitulasi Akreditasi Madrasah Menurut Provinsi* [Data set]. https://appmadrasah.kemenag.go.id/kelembagaan/rekapitulasi/akreditasi

Khadar, A. A., Kansra, P., & Khan, S. A. (2025). Challenges of Accreditation in Developing Countries: Overcoming Barriers and Expanding Opportunities. In A. Naim, A. Saklani, S. A. Khan, & P. K. Malik (Eds.), *Global Perspectives on Quality Management and Accreditation in Higher Education* (pp. 299–316). IGI Global Scientific Publishing. https://doi.org/10.4018/979-8-3693-9481-6.ch013

Liu, C., Tu, J., & He, Y. (2023). Measurement of China's Human Development Index and Analysis of Its Influencing Factors from the Perspective of New Development Concept. *Social Indicators Research*, *167*(1–3), 213–268. https://doi.org/10.1007/s11205-023-03105-w

Muhayani, U., Lestantyo, P., Dalle, Abd. R. A., & Sutrisno. (2026). Analisis Kontribusi Eksistensi Madrasah Ibtidaiyah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Timur. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, *11*(3), 5918–5928.

Pont, B. (2020). A Literature Review of School Leadership Policy Reforms. *European Journal of Education*, *55*(2), 154–168. https://doi.org/10.1111/ejed.12398

Priatna, A., Suherman, W. S., Hermawan, H. A., & Cahyono, C. (2026). The Paradox of educational administration in the Merdeka Belajar era: Between policy simplification and the complexity of school practices. *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, *45*(3). https://doi.org/10.21831/cp.v45i3.94628

Prihono, E. W., Latuapo, R., Lapele, F., Dwiningrum, S. I. A., Arlinwibowo, J., & Reyes Jr., M. S. (2025). Assessment and measurement bias in madrasa performance evaluation: Evidence from underdeveloped areas in Indonesia. *REID (Research and Evaluation in Education)*, *11*(2), 129–141. https://doi.org/10.21831/reid.v11i2.71444

Rohman, A., & Mudis Taruna, M. (2025). Islamic boarding school policy in response to the transmission of transnational religious ideologies in Klaten, Indonesia. *Cogent Education*, *12*(1). Scopus. https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2436291

Setiyani, Z., Panjawa, J. L., Prakoso, J. A., & Septiani, Y. (2025). Impacts of Capital Formation, Labor, Human Development, and Tourism on Economic Growth in Yogyakarta Province. *Journal of Developing Economies*, *10*(2), 293–310. https://doi.org/10.20473/jde.v10i2.74812

Sholekah, I., Wardani, D. P. K., Parawansah, K. I., Naja, E. N., & Yusuf, I. M. (2026). Relasi

Akreditasi dan Sertifikasi Guru dalam Penjaminan Mutu Madrasah Ibtidaiyah. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, *11*(3), 365–376.

Suryawati, D. (2026). Pentingnya Akreditasi dalam Proses Pembinaan Manajemen Sekolah/Madrasah di Sumatera Utara. *Widyariset*, *13*(1), 113–122. https://doi.org/10.14203/widyariset.13.1.2010.113-122

Umar, A., Kusaeri, K., Ridho, A., Yusuf, A., & Asyhar, A. H. (2022). Does opportunity to learn explain the math score gap between madrasah and non-madrasah students in Indonesia? *Jurnal Cakrawala Pendidikan*, *41*(3), 792–805. https://doi.org/10.21831/cp.v41i3.40169

Wafik, D., & Tharwat, A. (2019). Challenges of Business Schools to Implement Accreditation Standards: Case Study. In M. Mateev & P. Poutziouris (Eds.), *Creative Business and Social Innovations for a Sustainable Future* (pp. 47–54). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-01662-3_7

Yunilarosi, E. S. (2025). Challenges in Institutional Accreditation Management (AIPT) and Its Ineffectiveness in Improving the Quality of Islamic Higher Education in Indonesia. *Asian Journal of Human Services*, *29*, 338–352. Scopus. https://doi.org/10.14391/ajhs.29.338

Copyright holder:
© Author

First publication right:
Jurnal Manajemen Pendidikan

This article is licensed under:
CC-BY-SA